



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. ARIEF S. TRINUGROHO, MT**
Jabatan : **Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara**
Selanjutnya disebut Pihak kesatu

Nama : **EDY RAHMAYADI**
Jabatan : **Gubernur Sumatera Utara**
Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut Pihak kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, November 2022

Pihak Kedua,
GUBERNUR SUMATERA UTARA

EDY RAHMAYADI

Pihak Kesatu,
**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Ir. ARIEF S. TRINUGROHO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19641127 199003 1 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya penyelesaian batas daerah di Provinsi Sumatera Utara	Persentase penyelesaian batas Daerah	100%
2	Terwujudnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%
3	Terwujudnya Pembinaan Aparatur Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintah	Persentase kegiatan dalam pembinaan aparatur pemerintahan dalam Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan di Daerah serta kegiatan evaluasi kerjasama Pemerintah/Badan Usaha/Swasta	100%
4	Meningkatnya peran pembinaan dari berbagai kalangan yang berkompeten terhadap kehidupan bermasyarakat dan beragama	Persentase proposal hibah yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100%
5	Meningkatkan pelayanan penyusunan produk hukum daerah	Persentase rancangan produk hukum Provinsi yang telah dieksaminasi	100%
		Persentase rancangan produk hukum daerah Kab/Kota yang telah dievaluasi dan difasilitasi	100%
6	Meningkatnya pelayanan informasi produk hukum daerah	Persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	100%
7	Terwujudnya pelayanan hukum dan HAM dalam menangani permasalahan hukum di lingkungan PemprovSU	Persentase penanganan perkara hukum di pengadilan	100%
		Persentase penanganan perlindungan HAM	100%
8	Mewujudkan dukungan kebijakan lingkup Perekonomian Daerah	Persentase perumusan kebijakan lingkup Perekonomian yang diimplementasikan	100%

		Persentase BUMD dan BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi dan kinerja keuangan yang sehat	100%
9	Mewujudkan proses dan pelayanan/layanan pengadaan secara elektronik yang transparan dan akuntabel dan terstandar LKPP	Persentase pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100%
		Pemenuhan 17 standarisasi LPSE	17 Standarisasi
10	Mewujudkan kualitas manajemen administrasi pembangunan yang profesional	Jumlah kebijakan yang dirumuskan dan digunakan dalam pengendalian pelaksanaan administrasi pembangunan Daerah	20 Kebijakan
		Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan melalui aplikasi	100%
11	Meningkatnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Indeks Pelayanan Publik	4,01 (A-)
		Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%
		Nilai capaian pelaporan kinerja	14
12	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah	Persentase Fasillitasi Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan	100%
13	Meningkatnya Pemanfaatan Gedung dan Mess Pemprovsu	Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprovsu	100%
14	Meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Materi Pimpinan	100%
		Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	100%

Program	Anggaran
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 428.103.626.532,-
2 Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp. 6.580.780.167,-
3 Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 2.112.346.550,-
4 Program Kesejahteraan Rakyat	Rp. 477.509.902.024,-
5 Program Penataan Organisasi	Rp. 2.466.957.000,-
6 Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 306.879.131.273,-
7 Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp. 4.388.473.515,-
8 Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp. 2.759.261.700,-
Total	Rp. 1.230.800.478.761,-

Medan, November 2022

Pihak Kedua,
GUBERNUR SUMATERA UTARA

EDY RAHMAYADI

Pihak Kesatu,
**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Ir. ARIEF S. TRINUGROHO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19641127 199003 1 002